



Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia

Abipraya Guntur Sulatiasto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, abipraya163@gmail.com

*Corresponding Author: abipraya163@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze government policies in overcoming the problem of intolerance and radicalism in Indonesia. This study uses a qualitative method with data collection techniques through document analysis. This study shows that government policies in overcoming the problem of intolerance and radicalism in Indonesia are still ineffective. Factors that influence government policies in overcoming the problem of intolerance and radicalism in Indonesia include the ability of state apparatus, community participation, and support from international institutions. Therefore, it is necessary to carry out the right strategy to increase the effectiveness of government policies in overcoming the problem of intolerance and radicalism in Indonesia. A comprehensive strategy that combines prevention, rehabilitation, and security policies can be a more effective policy in overcoming radicalism and intolerance in Indonesia.*

Keywords: *policy, intolerance, radicalism, strategy, comprehensive*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah intoleransi dan radikalisme di Indonesia masih belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah intoleransi dan radikalisme di Indonesia antara lain adalah kemampuan aparatur negara, peran serta masyarakat, dan dukungan dari lembaga internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektifitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Strategi yang komprehensif yang menggabungkan pencegahan, rehabilitasi, dan kebijakan keamanan dapat menjadi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi di Indonesia.

Kata Kunci: kebijakan, intoleransi, radikalisme, strategi, komprehensif

PENDAHULUAN

Intoleransi dan radikalisme merupakan ancaman serius bagi keutuhan dan kerukunan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menghambat proses demokratisasi dan pembangunan nasional. Kasus-kasus intoleransi, seperti kekerasan antaragama di Ambon dan Maluku, konflik etnis di Kalimantan Barat, serta gerakan separatis di Aceh dan Papua, menunjukkan betapa rentannya bangsa ini terhadap perpecahan akibat intoleransi dan radikalisme (Bertrand, 2004, seperti dikutip dalam Pusat Studi Agama dan Demokrasi, 2017).

Data menunjukkan bahwa sikap intoleransi di Indonesia cenderung meningkat. Survei dari Wahid Institute (2020) menggambarkan bahwa sikap intoleransi di Indonesia meningkat dari 46 persen menjadi 54 persen. Selain itu, kasus intoleransi dan diskriminasi yang masih terjadi turut menyumbang pada tertahannya Indonesia dalam kategori negara dengan demokrasi cacat (*flawed democracy*) dalam Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2022 (Lembaga Survei Indonesia, 2023).

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan. Salah satu pendekatan yang diambil adalah program deradikalisasi melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi (Kemendikbud, 2021). Program ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang moderat dalam beragama dan meningkatkan rasa nasionalisme.

Program deradikalisasi juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan (Sandi, 2018, seperti dikutip dalam Sandi & Susanto, 2021). Pemerintah menekankan pentingnya peran pentahelix—kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku bisnis, dan media—dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan intoleransi (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022).

Salah satu kebijakan tegas yang diambil adalah pembubaran organisasi yang dianggap menyebarkan ideologi radikal seperti pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2020. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan kewenangan kepada aparat untuk menangkap dan menindak kelompok-kelompok yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme (DPR RI, 2018).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melaksanakan program deradikalisasi melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan agama terhadap mantan pelaku terorisme (BNPT, 2021). Program ini melibatkan tokoh agama dan psikolog untuk mengubah pola pikir mantan narapidana agar kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih moderat. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, efektivitas implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Berdasarkan analisis data dari berbagai sumber, ditemukan beberapa kendala utama.

Pertama, kurangnya koordinasi antarlembaga. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering kali tidak terimplementasi secara optimal di daerah karena kurangnya koordinasi antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah (Setara Institute, 2021). Misalnya, beberapa kebijakan terkait pendidikan toleransi mengalami hambatan dalam penerapan di sekolah-sekolah berbasis agama.

Kedua, resistensi dari kelompok tertentu. Program deradikalisasi sering kali mendapat resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang masih memiliki simpati terhadap ideologi radikal (Wahid Institute, 2021). Beberapa mantan narapidana terorisme bahkan kembali melakukan tindakan radikal setelah bebas.

Ketiga, peran media sosial dalam penyebaran narasi radikal. Media sosial menjadi alat yang efektif bagi kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda mereka. Meskipun

pemerintah telah berupaya melakukan pemblokiran terhadap situs dan akun yang menyebarkan paham radikal, upaya ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak konten radikal yang beredar secara luas (Kominfo, 2022).

Keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai salah satu pemicu utama tumbuhnya intoleransi dan radikalisme. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung lebih mudah terpengaruh oleh narasi radikal yang menjanjikan perubahan sosial dan ekonomi (BPS, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap kebijakan-kebijakan ini penting untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mengatasi masalah intoleransi dan radikalisme di Indonesia, serta untuk merumuskan strategi yang lebih komprehensif dan inklusif di masa mendatang.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti teks dan dokumen. Pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah terkait intoleransi dan radikalisme, karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, proses, dan makna di balik kebijakan tersebut.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen resmi pemerintah seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan intoleransi dan radikalisme, laporan lembaga terkait seperti laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama, dan lembaga lainnya yang berperan dalam penanganan intoleransi dan radikalisme, penelitian terdahulu seperti studi akademik, tesis, disertasi, dan artikel jurnal yang membahas topik serupa, dan publikasi media massa seperti artikel berita, opini, dan laporan investigasi dari media cetak maupun online yang memberikan informasi mengenai implementasi dan dampak kebijakan pemerintah terkait.

Data yang diperoleh melalui analisis dokumen akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data yakni memilih dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian dari berbagai dokumen yang telah dikumpulkan, kategorisasi yakni dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, misalnya berdasarkan jenis kebijakan, strategi implementasi, atau tantangan yang dihadapi, interpretasi yakni dengan menafsirkan data untuk memahami efektivitas kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap penurunan tingkat intoleransi dan radikalisme, dan penarikan kesimpulan yakni menyimpulkan temuan utama dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menerapkan triangulasi sumber yakni membandingkan informasi dari berbagai sumber dokumen untuk memastikan konsistensi dan akurasi data, peer debriefing yakni mendiskusikan temuan dan interpretasi dengan rekan sejawat atau pakar di bidang terkait untuk mendapatkan masukan dan kritik konstruktif, dan audit trail yakni mencatat secara rinci proses pengumpulan dan analisis data sehingga dapat ditelusuri dan dievaluasi oleh pihak lain.

Dengan metode penelitian kualitatif melalui analisis dokumen ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi intoleransi dan radikalisme di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas dan implikasi dari kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia

Intoleransi dan radikalisme merupakan isu yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, mempengaruhi stabilitas sosial dan keberagaman budaya. Berbagai studi dan survei telah dilakukan untuk memahami fenomena ini dan dampaknya terhadap masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute (2020), tingkat intoleransi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, dengan 61 persen responden melaporkan bahwa mereka merasa tertekan oleh keberagaman agama dan budaya di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang mendalam terhadap pluralisme yang dihadapi masyarakat.

Survei yang dilakukan oleh Wahid Institute pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sikap intoleransi di Indonesia meningkat dari 46 persen menjadi 54 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh populasi menunjukkan kecenderungan intoleran terhadap perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan.

Hasil survei dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa sekitar 30 persen generasi muda di Indonesia memiliki pandangan yang toleran terhadap tindakan radikal, yang mengindikasikan adanya potensi rekrutmen untuk kelompok ekstremis (BNPT, 2021). Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai langkah preventif terhadap radikalisasi.

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong peningkatan radikalisasi online, yang melahirkan fenomena *self-radicalization* dan aksi *lone wolf*. Penelitian I-Khub Outlook BNPT 2023 menunjukkan bahwa tiga kelompok rentan—remaja, anak-anak, dan perempuan—menjadi sasaran utama pola radikalisasi ini. Kepala BNPT menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap fenomena ini dalam kegiatan silaturahmi dengan masyarakat dan pelajar Indonesia di Melbourne, Australia, pada 16 September 2023 (bnpt.go.id)

Sepanjang tahun 2024, BNPT memblokir 180.954 konten yang mengandung intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Selain tindakan pemblokiran, BNPT juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme. Upaya ini bertujuan mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan memutus rantai radikalisme di Indonesia, sejalan dengan Asta Cita Presiden RI yang menitikberatkan penguatan Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM (bnpt.go.id)

Pada 7 Desember 2022, terjadi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Pelaku, Agus Sujatno alias Abu Muslim, adalah mantan narapidana teroris yang dibebaskan pada 2021 setelah menjalani hukuman empat tahun penjara. Setelah bebas, ia tetap menunjukkan sikap tertutup dan sulit didekati, sehingga masuk dalam "status merah" dalam program deradikalisasi BNPT, yang menunjukkan kerentanannya untuk kembali ke paham radikal (wikipedia.org). BNPT mengungkapkan bahwa kelompok teroris memiliki preferensi terhadap aplikasi pesan tertentu untuk berkomunikasi dan menyebarkan ideologi mereka. Hal ini menunjukkan adaptasi mereka terhadap perkembangan teknologi untuk mendukung aktivitas terlarang (news.detik.com).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme seringkali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, dan gencarnya propaganda kelompok radikal (Tahir & Tahir, 2020). Faktor-faktor ini dapat membuat individu rentan terhadap ideologi radikal yang menawarkan solusi sederhana terhadap permasalahan kompleks.

Penelitian oleh Azzuhri (2019) menjelaskan bahwa radikalisasi sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa individu yang merasa terpinggirkan secara sosial lebih rentan untuk terpengaruh oleh ideologi

ekstremis. Azzuhri menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah ini, termasuk perbaikan kondisi sosial dan ekonomi serta promosi dialog antaragama.

Dari sudut pandang kebijakan, buku "Radikalisasi dan Penanganan Terorisme di Indonesia" yang ditulis oleh Sari (2020) mengusulkan bahwa pemerintah perlu memperkuat kerjasama lintas sektoral untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Sari menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendukung upaya-upaya ini melalui program-program pendidikan yang mempromosikan toleransi dan kedamaian.

Kebijakan Penanganan Intoleransi dan Radikalisme: Implementasi dan Tantangan

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi intoleransi dan radikalisme melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor pendidikan. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam mencegah radikalisme dan intoleransi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan bahwa berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Komunikasi dan Informatika, serta organisasi masyarakat Islam, terlibat dalam upaya pencegahan ini. Pendekatan ini mencakup pendidikan sejak usia dini hingga perguruan tinggi, dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector dalam koordinasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan radikalisme (wapresri.go.id).

Sektor pendidikan diakui sebagai medium penting dalam mencegah infiltrasi radikalisme di kalangan generasi muda. Penelitian oleh Darraz (2024) menekankan bahwa melalui pendidikan, generasi muda dapat meningkatkan kapasitas kognitif-afektif mereka melalui penanaman nilai-nilai positif seperti disiplin, toleransi, dan pemikiran kritis. Upaya kesadaran tentang bahaya intoleransi dan radikalisme dapat ditanamkan melalui proses pendidikan, sehingga hal-hal negatif tersebut dapat dicegah sejak dini.

Pemerintah juga melakukan penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan di sekolah-sekolah. Program ini bertujuan untuk menanamkan rasa toleransi dan saling menghormati di kalangan generasi muda. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat mengurangi potensi radikalisasi di kalangan pelajar.

Pemerintah Indonesia telah memasukkan konsep toleransi dalam kurikulum pendidikan nasional, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Pendidikan Agama. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga mengembangkan program Moderasi Beragama yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya sikap moderat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat (Zarkasyi, 2021).

Guru memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi di lingkungan sekolah. Seorang pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai role model dalam menerapkan sikap toleransi dalam interaksi sehari-hari. Studi yang dilakukan oleh Widiyanto (2022) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis nilai memiliki tingkat toleransi siswa yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang hanya mengajarkan toleransi secara teoretis.

Selain itu, pendekatan pendidikan inklusif juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan toleransi di sekolah. Dengan adanya kebijakan yang memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan agama belajar bersama, maka kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman dapat ditanamkan sejak dini. Di sekolah, pendidikan toleransi juga diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, seperti kegiatan pramuka, forum diskusi lintas agama, dan program

pertukaran pelajar antar daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara siswa dari latar belakang yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai.

Meskipun pendidikan toleransi telah menjadi bagian dari kurikulum, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah adanya pengaruh lingkungan sosial dan media yang dapat memperkuat prasangka atau sikap eksklusivisme di kalangan siswa. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi guru dalam mengajarkan toleransi secara efektif juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Selain itu, hasil penelitian oleh Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa beberapa sekolah masih mengalami kendala dalam menerapkan pendidikan toleransi akibat pengaruh nilai-nilai konservatif yang dianut oleh komunitas sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan toleransi tidak hanya membutuhkan dukungan dari sekolah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan keterbukaan. Perguruan tinggi tidak luput dari infiltrasi paham radikal. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan positif terkadang terlibat dalam kelompok radikal, meskipun tidak semua berujung pada tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam menangani radikalisme di kalangan generasi muda (Sirry, 2023).

Penelitian oleh Rahman (2022) menunjukkan bahwa masih terdapat stigma terhadap kelompok tertentu yang dianggap radikal, yang dapat menghambat upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Minimnya pendidikan yang menekankan toleransi antarumat beragama dan antaranggota masyarakat menjadi salah satu faktor penyebaran paham radikalisme. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan dapat memicu sikap intoleran (kemenkopmk.go.id).

Penguatan juga dilakukan dengan pemanfaatan kebudayaan sebagai alat untuk mengatasi intoleransi. Direktorat Jenderal Kebudayaan menekankan bahwa pemanfaatan ruang-ruang publik untuk kegiatan kebudayaan seperti seni dan hiburan dapat menyentuh pranata keluarga dan individu, yang selama ini menjadi hulu dari permasalahan radikalisme. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh radikalisme melalui penguatan nilai-nilai budaya (kebudayaan.kemdikbud.go.id).

Upaya mengatasi intoleransi dan radikalisme di Indonesia juga dilakukan oleh BNPT dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah, termasuk Papua Barat Daya, untuk membangun kesiapsiagaan nasional dalam mencegah paham intoleransi dan radikalisme. FKPT hadir sebagai wadah koordinasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan aparat keamanan, guna memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman terorisme.

Pembentukan FKPT berlandaskan pada Peraturan Kepala BNPT dan merupakan bagian dari strategi pencegahan berbasis pendekatan lunak (*soft approach*) dalam penanggulangan terorisme. Forum ini memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan kampanye deradikalisasi di berbagai sektor masyarakat, termasuk pendidikan, media, dan komunitas lokal (Setyawan, 2021).

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) beroperasi di tingkat provinsi dengan mandat utama sebagai penyuluh, fasilitator, serta perantara antara pemerintah pusat dan masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme. FKPT antara lain melakukan fungsi edukasi dan sosialisasi. FKPT sering mengadakan seminar, diskusi publik, dan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini melibatkan akademisi, praktisi media, dan pemuka agama guna menciptakan narasi yang damai dan toleran (Suryana & Fauzi, 2022).

Forum ini juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian. Program seperti pelatihan literasi digital bagi pelajar dan guru bertujuan untuk menangkal penyebaran paham radikal di media sosial dan ruang digital lainnya (Santoso, 2023). Forum juga memiliki peran

dalam membina dan mengintegrasikan kembali mantan narapidana terorisme (napiter) ke dalam masyarakat. Dengan bantuan psikolog dan tokoh agama, forum ini membantu proses deradikalisasi secara holistik (Hakim, 2021).

Penelitian oleh Hasyim (2019) menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang melibatkan keluarga dan komunitas memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah kembalinya individu ke jalur radikal. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme dan radikalisme. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya keterbatasan anggaran dan sumber daya yang membatasi ruang gerak mereka dalam melaksanakan program-program pencegahan terorisme secara maksimal (Arifin, 2022).

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) juga menghadapi tantangan dalam merangkul seluruh elemen masyarakat. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki pandangan yang selaras dengan program FKPT, terutama di wilayah yang masih dipengaruhi oleh ideologi eksklusif dan konservatif. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif perlu dikembangkan untuk menarik partisipasi lebih luas dari masyarakat (Rohim & Maulana, 2023).

Selain tantangan tersebut, tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi dan maraknya propaganda radikal di media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi FKPT. Meskipun telah ada upaya dalam membangun kontra-narasi di dunia maya, strategi yang lebih inovatif dan masif masih diperlukan untuk menangkal penyebaran konten radikal secara efektif (Satria, 2023). Anonimitas dan aksesibilitas teknologi, ditambah dengan algoritma media sosial yang memperkuat bias konfirmasi, serta kurangnya literasi digital, menjadi tantangan signifikan dalam pencegahan intoleransi dan radikalisme (Setiawan, 2024).

Pemerintah juga aktif dalam melakukan kerjasama internasional untuk menangani terorisme dan radikalisme. Melalui forum-forum internasional, Indonesia berbagi pengalaman dan strategi dalam menangani isu ini, serta belajar dari negara lain. Menurut penelitian oleh Sari (2020), kolaborasi internasional dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menangani ancaman radikalisme.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, negara-negara sahabat, serta lembaga regional dan global untuk menanggulangi radikalisme. Kerja sama ini mencakup aspek keamanan, pendidikan, teknologi, serta pemberdayaan masyarakat sipil guna menciptakan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangkal ideologi ekstrem.

Kerja sama internasional dalam mengatasi intoleransi dan radikalisme di Indonesia diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain Kerjasama keamanan dan intelijen. Indonesia aktif berkolaborasi dengan lembaga internasional seperti Interpol, United Nations Counter-Terrorism Committee (UNCTC), dan ASEAN Counter-Terrorism Network dalam berbagi data intelijen dan menangkal ancaman teroris lintas negara. Salah satu contoh nyata adalah kerja sama dengan Australia melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), yang telah melatih ribuan aparat keamanan dalam menangani kejahatan terorisme (Jones, 2021).

Indonesia bekerja sama dengan lembaga internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan pemerintah negara-negara Eropa untuk menjalankan program deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme. Program ini berfokus pada reintegrasi sosial dan ekonomi guna mengurangi kemungkinan mereka kembali ke jaringan ekstremis (Yusran, 2022). Indonesia juga menerima bantuan teknis dan pendanaan dari berbagai mitra internasional, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, dalam mengembangkan program pencegahan radikalisme berbasis komunitas. Bantuan ini mencakup pelatihan bagi

guru, penguatan literasi digital, serta penyebaran narasi moderasi beragama di media sosial (Aziz, 2023).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menjalin kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir dan Uni Emirat Arab, dalam mempromosikan Islam moderat melalui pertukaran pelajar dan program pelatihan bagi ulama. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, misalnya, menjadi mitra utama dalam membentuk generasi cendekiawan Muslim yang mengusung nilai-nilai toleransi (Rohim, 2023).

Mengingat bahwa internet menjadi salah satu medium utama penyebaran paham radikal, Indonesia telah bekerja sama dengan platform digital global, seperti Google, Facebook, dan Twitter, untuk menghapus konten ekstremisme dan menyebarkan narasi positif. Program seperti Google Counter-Terrorism Initiative dan Facebook's Digital Literacy Program membantu Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya propaganda radikal di internet (Santoso, 2023).

Meskipun kerja sama internasional dalam menangani intoleransi dan radikalisme telah membawa berbagai manfaat, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan mitra internasional dalam mengimplementasikan program yang telah dirancang. Inkonsistensi kebijakan dan birokrasi yang kompleks sering kali menghambat efektivitas kerja sama ini (Hakim, 2022).

Tantangan berikutnya adalah ketidakseimbangan prioritas nasional dan global. Terkadang, agenda internasional dalam menanggulangi radikalisme tidak selalu selaras dengan kebutuhan dan prioritas domestik Indonesia. Beberapa inisiatif global lebih menekankan aspek keamanan, sementara Indonesia lebih menitikberatkan pada pendekatan lunak berbasis pendidikan dan pemberdayaan ekonomi (Suryana, 2021).

Selain itu, tidak semua strategi internasional dapat langsung diterapkan di Indonesia tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Program deradikalisasi, misalnya, sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat yang masih skeptis terhadap keterlibatan asing dalam isu keagamaan dan keamanan nasional (Maulana, 2023). Meskipun kerja sama internasional telah berhasil dalam banyak aspek, kelompok radikal juga terus mengembangkan strategi baru, terutama di ranah digital. Oleh karena itu, efektivitas kerja sama ini perlu terus diperbarui dengan inovasi dan pendekatan yang lebih fleksibel (Taufik, 2023).

Penanganan Intoleransi dan Radikalisme di Negara Lain

Intoleransi dan radikalisme merupakan permasalahan global yang mengancam stabilitas sosial, keamanan, dan demokrasi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan yang efektif dalam menekan penyebaran ideologi ekstremisme dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Melalui kombinasi kebijakan keamanan, pendidikan, serta program deradikalisasi dan reintegrasi, beberapa negara berhasil mengurangi ancaman radikalisme dan intoleransi dalam jangka panjang.

Inggris, misalnya, menerapkan strategi Prevent sebagai bagian dari program CONTEST yang bertujuan untuk mencegah radikalisasi sejak dini. Prevent berfokus pada identifikasi individu yang rentan terhadap ekstremisme dan memberikan intervensi berbasis pendidikan serta komunitas. Program ini melibatkan sekolah, universitas, dan komunitas lokal dalam mendeteksi potensi radikalisasi di masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan platform digital untuk menangkal propaganda ekstremis di dunia maya. Hasilnya, sejumlah serangan teroris berhasil dicegah melalui deteksi dini dan rehabilitasi individu yang berpotensi terdampak radikalisasi (Neumann, 2021).

Denmark mengembangkan Aarhus Model, sebuah pendekatan berbasis komunitas yang bertujuan untuk merehabilitasi individu yang terdampak radikalisme, khususnya mantan

pejuang asing (*foreign fighters*) yang kembali dari zona konflik. Program ini menawarkan bimbingan psikologis, pendidikan ulang, serta bantuan ekonomi bagi individu yang ingin meninggalkan ekstremisme. Aarhus Model menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan komunitas dalam mencegah serta menangani radikalisme. Efektivitasnya terbukti dengan berkurangnya jumlah pemuda Denmark yang bergabung dengan kelompok ekstremis di luar negeri (Bjørge & Silke, 2022).

Jerman menerapkan Program EXIT, yang bertujuan untuk membantu individu yang ingin meninggalkan kelompok ekstremis, baik sayap kanan maupun kelompok jihadis. Program ini memberikan konseling, perlindungan hukum, serta bantuan integrasi ke dalam masyarakat bagi mereka yang ingin keluar dari kelompok radikal. EXIT beroperasi dengan pendekatan berbasis psikososial, yang membantu individu memahami dampak negatif ekstremisme dan memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik. Program ini sukses membantu banyak mantan ekstremis untuk kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko rekrutmen anggota baru oleh kelompok radikal (Koehler, 2020).

Singapura mengadopsi pendekatan berbasis rehabilitasi keagamaan untuk menangani radikalisme, melalui Religious Rehabilitation Group (RRG). Program ini melibatkan ulama dan cendekiawan Muslim untuk memberikan pemahaman agama yang lebih moderat kepada individu yang terdampak paham ekstremis. Selain itu, Singapura juga menerapkan kebijakan ketat dalam keamanan nasional, termasuk undang-undang Internal Security Act (ISA) yang memungkinkan tindakan preventif terhadap ancaman terorisme. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah aksi terorisme serta membantu individu kembali ke kehidupan normal (Ramakrishna, 2021).

Prancis menerapkan kebijakan berbasis sekularisme (*laïcité*) untuk menekan pengaruh ekstremisme dalam kehidupan publik. Pemerintah mengawasi ketat lembaga pendidikan dan tempat ibadah untuk memastikan bahwa tidak ada ajaran yang mengarah pada radikalisme. Prancis juga menutup sejumlah masjid dan organisasi yang terbukti menyebarkan ideologi ekstremis. Di sektor pendidikan, program penguatan nilai-nilai sekuler dan toleransi diajarkan sejak dini di sekolah-sekolah untuk mencegah tumbuhnya ideologi intoleran (Vidino, 2022).

Keberhasilan kebijakan dalam menangani intoleransi dan radikalisme di negara-negara tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, pendekatan holistik. Negara seperti Denmark dan Jerman menggunakan metode rehabilitasi yang melibatkan komunitas, psikolog, serta kesempatan ekonomi bagi individu yang ingin meninggalkan ekstremisme. Kedua, intervensi dini. Inggris dan Singapura menitikberatkan pencegahan sejak dini dengan melibatkan sekolah, komunitas, dan pemuka agama. Ketiga, keamanan dan hukum yang ketat.

Prancis dan Singapura mengombinasikan strategi pendidikan dan sekularisme dengan kebijakan keamanan yang tegas untuk menekan penyebaran paham ekstrem. Keempat, adaptasi terhadap tantangan digital. Negara-negara ini juga bekerja sama dengan platform digital untuk mengatasi propaganda radikal yang semakin berkembang di dunia maya.

KESIMPULAN

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani intoleransi dan radikalisme, tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan politik mereka. Inggris dengan strategi Prevent, Denmark dengan Aarhus Model, Jerman dengan Program EXIT, Singapura dengan Religious Rehabilitation Group (RRG), dan Prancis dengan kebijakan sekularismenya, semuanya menunjukkan efektivitas dalam menangani ekstremisme dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks nasional mereka.

Meskipun belum ada solusi tunggal yang dapat diterapkan di semua negara, strategi yang menggabungkan pencegahan, rehabilitasi, dan kebijakan keamanan terbukti lebih efektif dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi di berbagai negara. Indonesia dapat belajar dari

pengalaman negara-negara tersebut untuk memperkuat strategi nasional dalam menghadapi tantangan intoleransi dan ekstremisme.

REFERENSI

- Aziz, M. (2023). Bantuan Internasional dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia: Studi Kasus Uni Eropa dan Amerika Serikat. *Jurnal Politik Global*, 11(2), 78-92.
- Arifin, M. (2022). Kendala Implementasi FKPT dalam Pencegahan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 45-57.
- Azzuhri, M. (2019). Radikalisasi dan Faktor-faktor Penyebabnya di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 45-60.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Laporan Program Deradikalisasi di Indonesia*. Jakarta: BNPT.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Laporan Survei tentang Pandangan Generasi Muda terhadap Radikalisasi*. Jakarta: BNPT.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kesenjangan Sosial dan Faktor Ekonomi dalam Radikalisme*. Jakarta: BPS.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2023, September 16). Kepala BNPT RI: Waspada Radikalisasi Online Menyasar Remaja, Anak, dan Perempuan. Diakses dari bnpt.go.id
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024, Januari 15). BNPT: 180 Ribu Konten Bermuatan Terorisme Diblokir Sepanjang 2024. Diakses dari bnpt.go.id
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bjørge, T., & Silke, A. (2022). *The Preventive Approach to Counter-Terrorism: The Aarhus Model*. Oxford University Press.
- Darraz, M. A. (2024). Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme melalui Kurikulum Satuan Pendidikan: Studi Dokumen Kurikulum Pendidikan Hayuning Pakarti SMA Negeri 5 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(02), 65–75.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Detik News. (2024, Januari 15). BNPT Ungkap Ada Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris. Diakses dari news.detik.com
- Effendi, M. R. (2020). Mitigasi Intoleransi dan Radikalisme Beragama di Pondok Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif. *Jurnal Pedagogie*, 1(1).
- Hakim, R. (2022). Koordinasi Kebijakan dalam Kerjasama Internasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(1), 45-59.
- Hakim, R. (2021). Pendampingan Mantan Narapidana Terorisme oleh FKPT: Sebuah Tinjauan Sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(2), 87-99
- Jones, S. (2021). Indonesia's role in international counter-terrorism cooperation. *Journal of Southeast Asian Security Studies*, 8(3), 112-128.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). Peran Pentahelix dalam Menangani Radikalisme di Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). Peran Pentahelix Penting Untuk Cegah Intoleransi dan Radikalisme. Diakses dari <https://www.kemendikbud.go.id/peran-pentahelix-penting-untuk-cegah-intoleransi-dan-radikalisme>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Mengatasi intoleransi melalui kebudayaan. Diakses dari kebudayaan.kemdikbud.go.id

- Kominfo. (2022). Laporan Pemantauan Media Sosial terhadap Propaganda Radikal.
- Koehler, D. (2020). *Understanding Deradicalization: Methods, Tools, and Programs for Countering Violent Extremism*. Routledge.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Diseminasi LSI 04 Mei 2023. Diakses dari <https://www.lsi.or.id/post/diseminasi-lsi-04-mei-2023>
- Maulana, D. (2023). Tantangan sosial dalam program deradikalisasi berbasis kerja sama internasional. *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 15(2), 56-70.
- Neumann, P. R. (2021). *Preventing Radicalization in Europe: The Role of Education and Community Engagement*. Cambridge University Press.
- Prasetyo, B. (2023). Tantangan pendidikan toleransi di Indonesia: Studi pada sekolah menengah di daerah konservatif. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 10(2), 45-60.
- Pusat Studi Agama dan Demokrasi. (2017). Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia. Diakses dari <https://inklusif-cideq.org/wp-content/uploads/2021/04/Peta-kuasa-intoleransi-dan-Radikalisme-di-Indonesia.pdf>
- Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 439.
- Ramakrishna, K. (2021). *Radical Pathways: Understanding Islamic Radicalization in Southeast Asia*. Stanford University Press.
- Rohim, A. (2023). Moderasi Islam dalam pendidikan: Studi kerja sama Indonesia dengan Al-Azhar Mesir. *Jurnal Studi Islam dan Keislaman*, 14(1), 33-47.
- Rohim, A., & Maulana, D. (2023). Strategi FKPT dalam Merangkul Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme. *Jurnal Politik dan Keamanan Nasional*, 10(3), 112-126.
- Sandi, I., & Susanto, E. (2021). Upaya Indonesia dalam Menangkal Potensi Intoleransi dan Radikalisme Pasca Taliban Berkuasa. *Global Mind*, 3(2), 123-135.
- Sandi, I., & Susanto, E. (2021). Upaya Indonesia dalam Menangkal Potensi Intoleransi dan Radikalisme Pasca Taliban Berkuasa. *Global Mind*, 3(2), 123-135. Diakses dari <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/globalmind/article/download/989/259>
- Santoso, T. (2023). Kolaborasi platform digital dalam menangkal propaganda radikal: Studi kasus Google dan Facebook di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Keamanan Siber*, 7(1), 67-80.
- Santoso, H. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme: Peran FKPT dalam Membangun Narasi Toleransi. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 12(1), 67-81.
- Saptapraja, K. (2022). Implementasi nilai Pancasila dalam menangani intoleransi di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 341-355.
- Sari, N. (2020). *Radikalisasi dan Penanganan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Aditama.
- Satria, T. (2023). Tantangan FKPT dalam Menangkal Radikalisme di Dunia Digital. *Jurnal Teknologi dan Keamanan Siber*, 7(2), 55-69.
- Setara Institute. (2020). Laporan tahunan tentang intoleransi di Indonesia. Jakarta: Setara Institute.
- Setara Institute. (2021). Indeks Toleransi Indonesia: Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Publik.
- Setiawan, Budi, dkk. (2024). Tantangan dan Strategi Pencegahan Konflik akibat Intoleransi dan Radikalisme di Era Digital untuk Mewujudkan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13 (3).
- Setyawan, D. (2021). FKPT dan Pencegahan Terorisme: Evaluasi Program dan Dampaknya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 15(2), 98-113.
- Sirry, Mun'im. (2023). Radikalisme di perguruan tinggi: Tantangan dunia kampus. Diakses dari itb.ac.id

- Supriyadi, E., Ghufron, A., & Sugiarto. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM Tentang Program Deradikalisasi. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 4(1), 54.
- Suryana, I. (2021). Prioritas nasional vs agenda global dalam strategi pencegahan terorisme di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Hubungan Internasional*, 10(2), 89-104.
- Suryana, I., & Fauzi, M. (2022). Peran FKPT dalam Meningkatkan Kesadaran Publik terhadap Bahaya Terorisme. *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(1), 78-91.
- Tahir, Imran & M. Irwan Tahir. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, XII (2): 74-83
- Taufiq, O. H., Budiman, A., & Nurholis, E. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ancaman intoleransi beragama terhadap ketahanan ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(2), 163–179.
- Taufik, H. (2023). Evolusi strategi radikalisme dan tantangan bagi kerja sama internasional. *Jurnal Kriminologi dan Keamanan Nasional*, 6(3), 90-108.
- Trisyhanda, A. (2022). Intoleransi dan Radikalisme Agama di Indonesia. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/trisyhandaadelia/627e279f18ffee5e8d24d7d2/intoleransi-dan-radikalisme-agama-di-indonesia>
- Vidino, L. (2022). *Countering Extremism in France: The Role of Laïcité and State Interventions*. Brookings Institution.
- Wahid Institute. (2020). Survei Sikap Keberagamaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 4(1), 54.
- Wahid Institute. (2021). Laporan Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia.
- Wakil Presiden Republik Indonesia. (2020). Kerja sama berbagai pihak, kunci pencegahan radikalisme dan intoleransi. Diakses dari wapresri.go.id
- Widianto, A. (2022). Pendidikan berbasis nilai sebagai strategi menanamkan toleransi di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 23-37.
- Wikipedia. (2023, Maret 10). Astana Anyar bombing. Diakses dari en.wikipedia.org
- Yusran, M. (2022). Reintegrasi mantan teroris: Efektivitas program rehabilitasi berbasis kerja sama internasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Keamanan*, 12(2), 49-65.
- Zarkasyi, I. (2021). Implementasi moderasi beragama dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 15(3), 112-125.